

Katastrofa Banjir Bahorok Dan Persekongkolan Mengelabui Publik

Oleh: Fachrurrazi "Rajidt" Ch. Malley



Keadaan Bukit Lawang setelah banjir

Hanya dalam tempo kurang dari setengah jam pada Minggu malam 2 Nopember 2003, hampir 300 nyawa manusia lenyap sia-sia. Lebih 400-an bangunan hancur lebur tak berguna disapu gulungan air lumpur pekat dan hantaman batang-batang pohon.

Tak butuh waktu lama memang gemuruh banjir mereda, namun sisa-sisa isak tangis orang-orang yang kehilangan anggota keluarga dan harta benda senantiasa terdengar hingga hari ini.

Tujuh bulan lebih telah berlalu, namun saat ini sekitar 700 kepala keluarga korban tragedi banjir Bukit Lawang Bahorok di pinggir Taman Nasional Gunung Leuser ternyata masih mendiami barak-barak penampungan di lods pasar desa Gotong-royong Kabupaten Langkat.

Sebagian di antaranya sudah kekeringan air mata meratapi malapetaka ini dan berganti dengan gerutuan panjang atas nasib buruk yang tak kunjung usai menimpa mereka. Bantuan yang melimpah dari berbagai pihak yang disalurkan melalui pemerintah daerah setempat dan lsm yang mengaku peduli serta melalui saluran-saluran lainnya, ternyata tidak membantu menanggulangi penderitaan mereka di lokasi wisata yang porak poranda.

Dengan menumpang 6 buah bus, pada medio Juni 2004 ini para korban malapetaka banjir Bahorok ini kembali mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menanyakan kepastian nasib mereka. Salah satu spanduk yang ditulis acak-acakan berbunyi: "Bukit Lawang jadi bubuk. Kami kehilangan dapur. Bapak-bapak jangan tidur mendengkur!"

Spanduk yang menggambarkan keputusan ini seperti tak berarti apa-apa ditenggelamkan ribuan spanduk lain pemilihan presiden di jalan-jalan kota Medan menuju kantor Gubernur Sumatera Utara. Kontras spanduk seperti mencerminkan tamsil bahwa nasib korban ini terlalu kecil dibandingkan dengan soal pemilihan presiden. Mungkin karena itu pula maka persoalan malapetaka banjir Bahorok tak terlalu serius ditangani oleh pihak-pihak yang semestinya bertanggungjawab.

Proses mempertanggungjawabkan malapetaka banjir Bahorok memang hanya dapat diawali dengan pemahaman utuh tentang dua realitas yang saling berkait satu sama lain dan keduanya ternyata bermuara pada upaya mengelak dari tanggungjawab pihak-pihak yang semestinya.

Realitas pertama adalah yang berkaitan dengan akibat dari malapetaka banjir, yakni kondisi memprihatinkan dari mereka yang ditinggal mati sanak keluarga, kehilangan rumah dan mata pencaharian, serta areal pertanian yang rusak parah tak bisa ditanami yang tak memungkinkan panen.

Meski telah secara berulang-ulang masyarakat korban malapetaka banjir Bahorok berdemonstrasi mendatangi pihak-pihak yang semestinya bertanggung-jawab atas penderitaan berkepanjangan yang mereka alami, namun sejauh ini yang ada hanya tawaran konsep-konsep pengelolaan kawasan pasca banjir yang disusun tanpa menyertakan para korban serta janji-janji yang entah kapan dipenuhi.

Realitas lainnya adalah yang menyangkut penyebab rusaknya hutan di hulu sungai Bahorok yang tak pernah terungkap. Dalam konteks ini, publik dan pihak-pihak tertentu terkesan hanya mengamini pernyataan yang dikeluarkan oleh Unit Manajemen Leuser (UML) di media massa bahwa malapetaka banjir Bahorok terjadi karena bencana alam.

Pernyataan yang menafikan kenyataan bahwa longsor dan banjir tak ada hubungannya dengan kerusakan di hulu sungai Bahorok yang menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser ini mestilah disiasati apa yang menjadi latar belakang dan maksudnya.

Merekayasa penyebab malapetaka

Jauh sebelum malapetaka terjadi sesungguhnya Bupati Kabupaten Langkat, H. Syamsul Arifin telah mengungkapkan kerisauannya bahwa sudah lebih 42.000 hektar hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di daerah Langkat dalam keadaan rusak parah karena berbagai sebab. Jika dibandingkan dengan luas TNGL di Kabupaten Langkat yang mencapai lebih dari 300.000 hektar, berarti hampir 1/5 bagian hutan di kawasan pelestarian alam ini mengalami deforestasi.

Pada kesempatan lain pihak Balai Taman Nasional Gunung Leuser malah menyatakan bahwa lebih dari 30% hutan di kawasan pelestarian alam ini sudah rusak karena perambahan dan penebangan liar.

Lalu, Unit Manajemen Leuser sebagai pihak penanggung jawab administrasi, keuangan, dan teknis pengelolaan kawasan ekosistem Leuser berkaitan dengan limpahan dana 50 juta Euro – juga pernah menyampaikan laporan hasil kerjanya sebelum malapetaka banjir terjadi bahwa mereka terkesan tidak menyukai perkembangan daerah wisata Bukit Lawang. Selain itu, UML juga mengaku memiliki dan menggunakan peralatan GIS canggih yang mampu mendeteksi kerusakan hutan yang dikelolanya dengan akurasi sampai luasan 5 meterpersegi dan memiliki data-data hasil investigasi yang relevan menyangkut penebangan liar di wilayah yang dikelolanya.

Rangkaian pernyataan itu secara gamblang bermakna bahwa kawasan hutan di sekitar daerah wisata Bukit Lawang Bahorok memang sudah rusak dan pihak-pihak yang disebutkan di atas memang mengetahui kondisi buruk ini.

Namun, hanya satu hari setelah malapetaka terjadi, keanehan vulgar menyeruak ketika Unit Manajemen Leuser (UML) melalui media cetak lokal buru-buru menyatakan bahwa penyebab peristiwa tragis di Bahorok adalah murni bencana alam.

UML dengan pernyataan ini mencoba meyakinkan publik bahwa banjir dan longsor yang menewaskan hampir 300 nyawa manusia itu tak ada hubungannya dengan kerusakan hutan di hulu sungai Bahorok. Dengan kata lain, UML ingin menyatakan pada publik bahwa tak pernah ada kerusakan hutan karena penebangan di hulu sungai Bahorok di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Pernyataan UML ini kemudian didukung pula dengan tayangan audio-visual yang mereka buat sendiri di berbagai media elektronik. Tayangan audio-visual yang menampilkan gambar-gambar tumpukan kayu berdiameter besar, aliran sungai berlumpur dan longoran tebing di hulu sungai Bahorok di Taman Nasional Gunung Leuser seakan ingin menegaskan kembali bahwa malapetaka banjir memang karena bencana alam. Tuhan lah yang sepatutnya dijadikan tertuduh atas terjadinya katastrofa di daerah wisata yang terkenal sampai ke mancanegara ini.

Naifnya, pernyataan UML ini kemudian serta merta diikuti pula oleh pernyataan pihak Pemerintah seperti Gubernur Sumatera Utara pada mass media dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada acara dengar pendapat dengan Komisi III DPR/RI tanggal 12 Nopember 2003 yang lalu.

Rekayasa penyebab malapetaka yang sesungguhnya masih memerlukan kajian dan debat akademis ini langsung mendapat respon dari berbagai kalangan. Menariknya, harian Kompas menampilkan artikel Hadi Ali Kodra guru besar IPB yang mengulas

hubungan malapetaka banjir Bahorok dengan pembangunan jalan Ladia Galaska di Nanggroe Aceh Darussalam seperti yang dianalisis oleh Longgeng Ginting Direktur Nasional WALHI.

Meski ulasan ini mengada-ada namun banyak pihak akhirnya dapat memaklumi karena pada saat yang sama ternyata WALHI sedang mengadvokasi penolakan pembangunan jalan Ladia Galaska dan sedang dalam proses menggugat secara hukum Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam karena bersikeras melanjutkan pembangunan jalan yang dikhawatirkan akan merusak sumberdaya hutan Leuser dalam skala yang luas.

Pemakluman ini menjadi semakin menguat ketika diketahui pula bahwa tayangan audio-visual di media televisi yang dipresentasikan Menteri Prakosa ternyata direkam melalui helikopter yang berpenumpang Mike Griffith (Direktur UML), Adi Susmianto (Mantan Kepala TNGL) dan Johnson Panjaitan (Ketua Dewan Nasional WALHI).

Dari rekayasa tuduhan bahwa malapetaka banjir Bahorok karena bencana alam maka sudah dapat ditebak maksudnya, yakni tidak satu pihak pun yang pantas dimintai tanggung jawabnya, kecuali Tuhan Yang Mahakuasa. Karena itu, dalam menyikapi peristiwa ini sebaiknya semua pihak diminta bersabar dan tawakal. Semestinya pula, jangan saling menyalahkan satu sama lain apalagi mencari-cari kesalahan pihak tertentu. Ini lah kalimat-kalimat bijak yang bertaburan dari mulut para pejabat, tokoh politik dan aktivis lsm ketika mengunjungi korban malapetaka banjir Bahorok.

Jastifikasi penyebab malapetaka

Penyebab malapetaka banjir Bahorok yang dilansir UML ini kemudian dilengkapi dengan informasi menesatkan publik dengan bumbu-bumbu istilah ilmiah seperti curah hujan tinggi tak seperti biasanya, karakteristik sistem lahan peka longsor, dan bentuk waduk-waduk alam. Paduan keadaan ini lah yang kemudian menggelontorkan jutaan ton lumpur dan ribuan kubik gelondongan sehingga dapat memporakporandakan

kawasan wisata Bukit Lawang Bahorok.

Untuk lebih meyakinkan publik, UML juga menayangkan pernyataan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa saat malapetaka banjir terjadi curah hujan di daerah itu memang sedang amat tinggi. Termasuk juga menayangkan pernyataan seorang ekologis yang ternyata adalah karyawan UML yang baru saja tamat studi magister.

Jastifikasi bahwa penyebab malapetaka adalah murni bencana alam ternyata tidak berhenti sampai disitu. Beberapa warga Bahorok juga diorganisir untuk melakukan ekspedisi “ecek-ecek” dengan rekaman video yang kemudian disiarkan lagi oleh media elektronik bahwa tidak terdapat bukti-bukti adanya penebangan di hulu sungai Bahorok.

Selanjutnya, sebuah seminar di USU yang penyelenggaraannya juga melibatkan pengelola TNGL dan ekosistemnya melakukan analisis dan penarikan kesimpulan atas bencana banjir dan longsor di Bukit Lawang. Namun, berbeda dengan pernyataan sebelumnya maka peserta seminar dengan lantang melakukan koor serempak menuduh bahwa penyebab kerusakan hutan TNGL dan ekosistemnya adalah karena kegiatan *illegal logging*. Lucunya, teriakan lantang yang diikuti dengan tuntutan agar pelakunya dijatuhi hukuman mati ini tidak menyebutkan secara gamblang tentang siapa pelaku tindak terorisme penghancur TNGL dan ekosistemnya. Tertuduh pelaku *illegal logging* menurut versi ini dapat ditafsirkan sebagai kelakuan hantu yang tak jelas ujudnya namun nyata akibat kelakuan dan perbuatannya.

Sementara itu, pada beberapa seminar kehutanan di Sumatera Utara diungkapkan pula bahwa kerusakan TNGL dan ekosistemnya adalah karena penebangan liar dan perambahan oleh pengungsi dari Aceh dan warga masyarakat sekitar TNGL. Perlakuan keliru ini menurut pengelola kawasan dilakukan para pengungsi karena mereka memang perlu memperpanjang hidupnya serta dilakukan warga sekitar TNGL yang masih miskin dan bodoh.

Penjelasan ini dilengkapi pula dengan daftar kasus penebangan liar yang sudah ditangani pihak kepolisian

daerah Sumatera Utara yang sebagian di antaranya malah sudah sampai ke pengadilan. Namun, tak satu pun dari daftar pelaku penebangan liar yang merupakan “orang penting” seperti yang dituduhkan UML. Mereka hanyalah orang kampung sekitar yang tak mungkin mampu membeli sebuah mesin chain-saw untuk digunakan menebang pohon dari TNGL.

Pernyataan melindungi kepentingan

Analisis dan kesimpulan yang disebutkan berulang-ulang melalui media massa bahwa malapetaka banjir Bahorok karena bencana alam murni dan segala upaya jastifikasinya, tentu tidak terlepas dari kepentingan pihak yang bertanggung-jawab mengelola kawasan berhutan ini.

Secara konstitusional, pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia dikuasai oleh negara. Atas nama negara lah, pemerintah republik ini mengendalikan pengelolaannya dengan beragam modus perlakuan melalui pemberian izin kelola kepada pemegang HPH/IUPHH (produksi), HTI/Perkebunan/Pertambangan (konversi), dan hak kelola kawasan pelestarian alam (konservasi).

Sudah jamak diketahui bahwa pengelolaan hutan di bawah kekuasaan rezim rezim Orde Baru cenderung memperciut jumlah dan mutu hutan yang akhirnya bermuara pada dituainya kerugian dan penderitaan bagi masyarakat luas yang menerima musibah banjir, longsor, kekeringan air, serangan hama, gagal panen, rusaknya sarana umum, konflik horizontal, dan lain sebagainya.

Biasanya, pengelola kawasan hutan yang semestinya bertanggung-jawab atas kegagalan mengelola hutan yang berakibat pada munculnya malapetaka lah yang dominan melakukan analisis dan kesimpulan untuk melontarkan tuduhan atas penyebab hancurnya hutan, termasuk apa yang menjadi sebab rusaknya TNGL dan ekosistemnya.

TNGL dengan luas sekitar 900.000 hektar yang ditetapkan pada tahun 1980 pada mulanya dikelola oleh Balai Taman Nasional Departemen Kehutanan. Pada tahun 1995 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan diputuskan untuk dikelola oleh

organisasi non-pemerintah/LSM bernama Yayasan Leuser Internasional (YLI).

LSM ini didirikan pada tahun 1994 oleh para mantan jenderal dan birokrat orde baru dan pada tahun 1995 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan diberikan hak kelola kawasan seluas 1, 79 juta hektar selama jangka waktu 7 (tujuh) tahun. Kawasan yang dikelola oleh YLI kemudian disebut kawasan ekosistem Leuser (KEL) dimana Taman Nasional Gunung Leuser dikatakan sebagai zona inti kawasan.

Pada hari Sabtu 28 Februari 1998, meski merupakan hari libur kerja dan hanya satu hari menjelang dimulainya pelaksanaan Sidang Umum MPR - Suharto mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa kawasan ekosistem Leuser untuk selanjutnya dikelola atas kerjasama antara Pemerintah dengan YLI untuk jangka waktu 30 (tiga puluh tahun).

Untuk kelancaran dan keberhasilan pengelolaan TNGL dan ekosistemnya ini maka Komisi Eropa dan Republik Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama keuangan membantu pendanaan selama 7 (tujuh) tahun pertama dengan nilai bantuan sebesar



50 juta EU yang dalam penggunaannya dimandatkan pada Unit Manajemen Leuser (UML).

UML mengakui bahwa dengan dana yang melimpah tersebut sudah sangat banyak program yang dikerjakan dalam rangka mengelola TNGL dan ekosistemnya (Kawasan Ekosistem Leuser/KEL), antara lain klaim keberhasilan merehabilitasi 9 daerah aliran sungai di TNGL dan ekosistemnya melalui penanaman 2,4 juta bibit lokal, penataan ribuan kilometer batas kawasan guna mengurangi kegiatan pengrusakan hutan, serta memobilisasi pernyataan deklarasi penyelamatan Leuser dari tokoh masyarakat sekitar. Sayangnya, pada tahun ketujuh atau saat-saat akhir pengelolaan oleh UML yang telah menghabiskan dana yang sangat besar itu pula lah malapetaka yang mengerikan itu terjadi di Bahorok Bukit Lawang.

Malapetaka banjir Bahorok seolah ingin membeberkan bahwa apa yang digembar-gemborkan sebagai keberhasilan itu adalah upaya untuk menutupi kegagalan dan ketidakmampuan UML untuk mengamankan kawasan kelolanya dari kegiatan-kegiatan yang merusak.



Keadaan Bukit Lawang setelah banjir

Seorang geolog malah menulis di kolom opini harian Waspada, bahwa pihak yang menyatakan malapetaka Bahorok sebagai bencana alam adalah ibarat seongkok sampah yang sok suci bicara tentang kebenaran.

Ornop ikut-ikutan dungu

Malapetaka banjir Bahorok selain bernuansa mengelabui publik, ternyata berhasil pula menumpulkan kekritisan beberapa organisasi non-pemerintah untuk berkoalisi menyikapi malapetaka ini.

Dengan berkantor di WALHI Sumatera Utara dilakukan diskusi-diskusi untuk menganalisis dan menyimpulkan penyebab malapetaka dan upaya-upaya membantu korban banjir tersebut.

Koalisi menyimpulkan bahwa berbagai pernyataan UML di atas bertendensi menafikan kenyataan akan adanya bukti-bukti bahwa cukup banyak kayu-kayu gelondongan yang sengaja dihanyutkan melalui sungai Bahorok sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi. Juga menihilkan kenyataan dari mana datangnya kayu-kayu yang digunakan untuk membangun ratusan bangunan pada bantaran sungai di Bukit Lawang selama ini. Termasuk pula mengesampingkan pertanyaan tentang untuk apa saja sebelumnya digunakan lebih dari 30-an chain saw yang terlihat aktif digunakan untuk memotong kayu-kayu guna memudahkan pencarian mayat korban banjir dan longsor di Bukit Lawang itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka koalisi ornop ini kemudian membuat pers release yang salah satu butir pernyataannya adalah meminta UML agar ikut bertanggungjawab atas terjadinya malapetaka banjir Bahorok. Tuntutan ini memang cukup beralasan karena dengan peralatan-peralatan yang dimilikinya maka UML diduga kuat mengetahui banyak tentang kerusakan hutan di hulu sungai Bahorok dan tidak memperingatkan akan kemungkinan terjadinya banjir dan longsor.

Pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan beberapa ornop ini kemudian difaksimilikan ke berbagai

media massa pada tanggal 4 Nopember 2003.

Namun, terjadi sesuatu yang dianggap sangat memalukan dan mencoreng muka banyak ornop karena pada tanggal 5 Nopember esoknya seseorang dari kantor WALHI Sumatera Utara ternyata mengirimkan faksimili ulangan yang menghapus tuntutan terhadap UML tersebut, tanpa diketahui oleh para penandatanganan pernyataan bersama tersebut.

Dengan kejadian seperti ini maka akhirnya tak satu pihak pun yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas malapetaka banjir Bahorok. Beberapa kalangan sangat menyayangkan bahwa kematian tragis warga Bukit Lawang Bahorok yang hampir mencapai 300 jiwa itu ternyata oleh organisasi-organisasi non-pemerintah pun memang cuma dianggap sebagai musibah biasa. Dan, yang paling penting adalah memulihkan kondisi kehidupan mereka-mereka yang luput dari kematian.

Untuk memulihkan kondisi ini maka para pedagang yang kehilangan mata pencarian harus dibangun kembali lapak niaganya dan diberi bantuan permodalan. Para petani yang arealnya rusak parah memerlukan pembangunan kembali bronjong sungai dan saluran irigasi. Yang kehilangan tempat tinggal harus dibantu mendirikan bangunan rumah yang memadai. Kawasan wisata yang hancur lebur harus ditataulang dan anak-anak usia sekolah harus mengikuti pendidikan yang tertunda selama ini.

Janji-janji elok ini sayangnya pula belum berwujud setelah 7 bulan berlalu. Korban malapetaka banjir Bahorok ini memang harus bersabar dan tawakal menghadapi persekongkolan para pengelabu publik. Entah sampai kapan?

Lalu, soal apakah memang telah terjadi kerusakan hutan di hulu sungai Bahorok dan apakah pengelola kawasan yang telah menghabiskan dana berlimpah ini perlu bertanggungjawab atau tidak, tak perlu diungkit-ungkit lagi.

Moga-moga dengan begitu tertetes pula sedikit bantuan dana melalui proyek-proyek yang dapat dikerjasamakan dan ini dapat terus menghidupkan asap dapur rumah tangga para aktivis ornop.

S E M O G A !!!